# ANALISIS PENGUKURAN KINERJA BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016-2018 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALEMBANG

# **SKRIPSI**



Nama: Yunita Sari NIM: 222015108

# ANALISIS PENGUKURAN KINERJA BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016-2018 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALEMBANG

# **SKRIPSI**

# Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Nama: Yunita Sari NIM: 222015108

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 2019

# PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Yunita Sari

Nim

: 222015108

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada yang merupakan menjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudahan hari telah terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang,

2019

Yang membuat pernyataan

7909BAFF913825341

Yunita Sari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

# TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul

Analisis Pengukuran Kinerja Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016-2018 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Yunita Sari

Nama NIM Fakultas

222015108 Ekonomi dan Bisnis

Program Studi Akuntansi

Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal, Pembimbing II, 2019

Pembimbing I,

(DR. Sa'adah Siddik, S.E., Ak., M.Si., C.A)

NIDN/NBM:0002095507/972321

(Mizan,S.E.,Ak.,M.Si.,C.A)

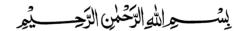
NIDN/NBM:0206047101/859196

Mengetahui, Dekan U.b. Ketua Program Studi Akuntansi

(Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., C.A)

NIDN/NBM:0216106902/944806

# **PRAKATA**



# Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang melimpah, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang motivator, junjungan umat islam, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Sehingga penyusunan skripsi yang berjudul Analisis Pengukuran Kinerja Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016-2018 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang telah dijadwalkan. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Adapun penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, serta bab simpulan dan saran. Hasil penelitian ini menunjukan adanya analisis pengukuran kinerja belanja daerah tahun anggaran 2016 hingga 2018 yaitu untuk analisis rasio keserasian dikatakan kurang serasi, karena rata-rata rasio keserasian 23,83%. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja belanja pada pemerintah Kota Palembang sudah baik, walaupun ada beberapa tahun perioder yang belanja modalnya tidak serasi. Untuk analisis rasio aktifitas bahwa rata-rata aktifitas belanja operasi sebesar 67,6% dan rata-rata aktifitas belanja modal sebesar

21,26%. Dilihat dari segi kinerja belanja sudah baik, hal ini dikarenakan anggaran belanja daerah yang terealisasi dari yang telah dianggarkan. Untuk analisis rasio pertumbuhan pada belanja daerah dikatakan sudah baik dikarenakan pencapaian tingkat pertumbuhan yang positif bagi kinerja belanja. Untuk rasio efisiensi tergolong cukup efisien. Hal ini dikarenakan kondisi kinerja belanja yang baik dalam rasio efisiensi pengukuran belanja.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta, (Ayahku Yunisman dan Ibuku Rita Sriyanti), serta seluruh keluarga besar yang selalu mendo'akan, memberikan motivasi dan inspirasi serta dukungan agar selalu menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pemimbingku Ibu DR. Sa'adah Siddik, S.E.,Ak.,M.Si.,C.A dan Bapak Mizan, S.E.,Ak.,M.Si.,C.A yang telah sabar membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan penelitian menjadi lebih baik lagi. Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam meyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

 Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.

- Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
- Bapak Betri, SE.,M.Si.,AK.,CA dan Ibu Nina Sabrina, SE.,M.Si selaku ketua
   Program dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas
   Muhammadiyah Palembang.
- 4. Bapak Ibu Saekarini Yuliarchtri, SE.,M.Si.Ak.CA Pembimbing Akademik paket 11 Angkatan 2015.
- Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
   Muhammadiyah Palembang beserta karyawan/karyawati.
- Kepala serta pegawai di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
   Daerah Kota Palembang yang dengan tulus mengarahkan dan membantu saya.
- 7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal ibadah yang kita lakukan mendapat keridhohan dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 2019

Yunita Sari

# **DAFTAR ISI**

		Haia	mai
SAMPU	L D	EPAN	i
HALAN	IAN	JUDUL	ii
HALAN	IAN	PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAN	IAN	PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAN	IAN	MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAN	IAN	PRAKATA	vi
HALAN	IAN	DAFTAR ISI	ix
HALAN	IAN	TABEL	xii
HALAN	IAN	DAFTAR GAMBAR	xiii
HALAN	IAN	DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTR	AK.		XV
<b>ABSTR</b> A	ACT		xvi
BAB I P	ENI	DAHULUAN	
	A.	Latar Belakang Masalah	1
	B.	Rumusan Masalah	7
	C.	Tujuan Penelitian	7
	D.	Manfaat Penelitian	8
BAB II	KA	JIAN PUSTAKA	
	A	. Kajian Pustaka9	9
		1. Landasan Teori	9
		a. Pengukuran Kinerja	9
		1.) Pengertian Pengukuran Kineria	9

		2.) Tujuan Pengukuran Kinerja 10
		3.) Manfaat Pengukuran Kinerja11
		4.) Indikator Kinerja
		b. Belanja Daerah
		1.) Pengertian Belanja Daerah
		2.) Klasifikasi belanja daerah
		3.) Kebijakan atas Belanja Pemerintah Daerah 22
		4.) Pengakuan Belanja
		5.) Pengukuran Kinerja
	B.	Penelitian Sebelumnya
BAB III	MI	ETODE PENELITIAN
	A.	Jenis Penelitian
	B.	Lokasi Penelitian
	C.	Operasional Variabel
	D.	Data yang Diperlukan
	E.	Metode Pengumpulan Data
	F.	Analisis Data dan Teknik Analisis
		1. Analisis Data
		2. Teknik Analisis
BAB IV	HA	SIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	A.	Hasil Penelitian
		1. Gambaran Umum BPKAD Kota Palembang 40
		2. Visi dan Misi BPKAD Kota Palembang

	3.	Struktur Organisasi	43
	4.	Tugas Pokok dan Tugas	46
B.	Pen	nbahasan Hasil Penelitian	58
	1.	Analisis Rasio Keserasian	59
	2.	Analisis Rasio Aktifitas Keuangan Daerah	60
	3.	Analisis Rasio Pertumbuhan	62
	4.	Analisis Rasio Efisiensi	65
BAB V SIM	<b>APUI</b>	LAN DAN SARAN	
A.	Sin	npulan	68
В.	Sar	an	69
DAFTAR PU	STAI	KA	70
LAMPIRAN			72

### **ABSTRAK**

Yunita Sari / 222015108 / Analisis Pengukuran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016-2018 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengukuran belanja daerah tahun anggaran 2016-2018 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Jenis penelitian ini adalah penelitian dekriptif. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan tehnik pengumpulan data yaitu dokumentasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang antara lain untuk rasio efisiensi BPKAD Kota Palembang tergolong efisien. Hal ini dikarenakan nilai rata-rata efisiensi yang diperoleh masih di bawah 100%. Untuk rasio aktivitas keuangan belanja modal mengatakan bahwa aktivitas keuangan BPKAD Kota Palembang menggambarkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterima. Untuk rasio keserasian masih banyak mengalokasikan Belanja Operasional daripada Belanja Modalnya. Untuk rasio pertumbuhan mengalami pertumbuhan yang positif. Hal ini dikarenakan mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Kata kunci: pengukuran belanja daerah

#### Abstract

Yunita Sari/222015108/Analysis of Regional Expenditures Measurement for Fiscal Year of 2016-2018 at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) Palembang City/ Public Sector Accounting

This study aimed to determine and analyze the regional expenditures measurement for fiscal year of 2016-2018 at BPKAD of Palembang city. This type of research was a descriptive research. This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) Palembang city. The data used was secondary data with data collection techniques, namely documentation. The results of research conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) Palembang city, among others, for the efficiency ratio of BPKAD Palembang city were relatively efficient. It was because the average value of efficiency obtained was still below 100%. For the ratio of capital expenditure financial activities of BPKAD Palembang City illustrate the costs incurred to obtain the income obtained is greater than the realization of income received. For the compatibility ratio, there was still a lot of allocation of operational expenditure rather than capital expenditure. For growth ratios experiencing positive growth. This was because it has increased every year.

Keywords: measurement of regional expenditure

PENGESAHAN NO. 494 / Abstract/LB/UMP/ VIII / 2015

Telah di Koreksi oleh

Lembaga Bahasa

Universitas Muhammadiyah Palembang

### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang pada pokoknya memberi batasan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Undang-undang tersebut membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing. kewenangan yang dimilikinya daerah akan lebih leluasa dalam menyusun anggaran dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah memiliki berbagai anggaran diantaranya anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Anggaran pendapatan adalah suatu perkiraan mengenai batas penerimaan tertinggi keuangan pemerintah sebagai sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja negara. Anggaran belanja adalah suatu perkiraan mengenai batas pengeluaran tertinggi keuangan pemerintah bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah untuk satu tahun.

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah dengan klasifikasi tertentu secara sistematis

untuk satu periode. Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung 1 januari sampai 31 desember.

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, transfer, surplus/defisit-laporan realisasi anggaran, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya (Dwi, 2015: 25).

Selain memiliki berbagai anggaran pemerintah juga memiliki belanja. Belanja adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengarang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota (Ramli, 2016: 8).

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengenai badan layanan umum. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintahan daerah terdiri

atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga (Ramli, 2016: 22).

Rasio pertumbuhan belanja adalah untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Maka dari itu, pemerintah daerah harus mengendalikan belanja daerah dengan melakukan efisiensi belanja (Mahmudi, 2016: 158).

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan oleh rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut tetapi relatif, artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengidentifikasikan telah terjadi pemborosan anggaran (Mahmudi, 2016: 164).

Rasio keserasian belanja adalah rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi dan belanja modal yang digunakan untuk sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Yoyo, 2017: 14-15).

Rasio aktifitas adalah rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal (Ramli, 2016: 140).

Pengukuran adalah proses pendapatan nilai untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalan laporan keuangan. Pengukuran menggambarkan penentuan besarnya jumlah dalam laporan keuangan. Belanja dikur sebesar jumlah pengelauran kas yang keluar dari rekenig kas umum atau rekening bendahara pengeluaran berdasarkan azas bruto (Baldrick, 2017: 217).

Kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi (Wiratna, 2015: 107).

Belanja daerah merupakan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja daerah yang teralokasi secara tepat ke pos-pos belanja yang dibutuhkan oleh masyarakat akan mendorong pertumbuhan yang positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Indra, 2016).

Siklus belanja daerah mencakup berbagai proses dan keputusan untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah termasuk dinas dan instansi pemerintah daerah. Transaksitransaksi dalam siklus belanja daerah ini sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Belanja daerah dapat diklasifikasikan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Menurut PSAP Nomor 02 Pemerintah No. 71 tahun 2010 belanja daerah Peraturan diklasifikasikan menjadi: 1) Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. 2) Belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan serta belanja aset tetap lainnya. 3) Belanja tidak terduga seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah (Bambang, 2017: 133).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Indra (2016), Mirki (2014), dan Cenissa (2017) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efisien mengalami cukup efisien karena mampu melihat prioritas anggaran terhadap realisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Indra (2016) dan Cenissa (2017) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang melakukan pengelolaan anggaran belanja mulai dari menetapkan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi anggaran belanja. Perencanaan anggaran belanja tersebut disesuaikan dengan kebutuhan BPKAD Kota Palembang pada satu tahun berikutnya, dalam

melaksanakan anggaran belanja sering terjadi selisih anggaran. Perbedaan antara angka anggaran (budget) dengan realisasi ini disebut penyimpangan atau variance, selisih lebih yang ditimbulkan oleh anggaran belanja biasa disebut favourable dan selisih kurang biasanya disebut unfavourable.

Tabel I.1 Belanja Daerah Kota Palembang Tahun 2016-2018

(Dalam Ribuan)

Tahun	Belan	ja Operasi	Belanja Modal			Belanja Tak Terduga			
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
2016	2.555.026.150	2.335.937.833	91,4	812.338.278	577.697.336	71,1	1.000.000	992.817	99,3
2017	2.489.421.736	2.283.607.852	91,7	889.936.798	857.095.134	94,4	2.650.000	64.000	2,42
2018	2.943.738.836	2.636.751.958	89,6	1.048.832.631	851.367.126	81,2	3.000.000	80.609	2,69

Sumber: BPKAD Kota Palembang, 2019

Berdasarkan Tabel I.1 menunjukkan bahwa belanja daerah Kota Palembang dari tahun 2016-2018 mengalami korelatif pada belanja daerah. Hal ini nampak jelas pada Tabel I.1 terjadi penurunan dan kenaikan di Tabel belanja daerah. Belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga merupakan bagian dari belanja daerah yang masih belum mencapai target. Namun, jika dilihat dari nominal persentasenya belanja daerah Kota Palembang mengalami kenaikan dan penurunan. Dapat ditemukan fenomena yang nampak jelas bahwa belanja operasi dan belanja modal pada tahun 2016 dan 2018 mengalami penurunan sedangkan belanja tak terduga pada tahun 2016-2018 mengalami kenaikan.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak terealisasinya anggaran belanja daerah menunjukkan anggaran belanja daerah Kota Palembang tahun 2016-2018 sudah baik atau cukup efisien, akan tetapi tidak terealisasinya anggaran belanja 100% menyebabkan anggaran belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Perlu dilihat dari rasio keserasian, rasio aktifitas dan rasio pertumbuhan, sehingga dapat dilihat bagaimana kinerja belanja pemerintah dalam pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Kota Palembang terhadap masyarakatnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Pengukuran Kinerja Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016-2018 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang".

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah rasio keuangan belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang?

# C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengukuran kinerja belanja daerah tahun anggaran 2016-2018 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

# 1. Bagi Penulis

Untuk meningkatan pengetahuan dan wawasan tentang analisis pengukuran kinerja belanja daerah tahun anggaran 2016-2018 pada BPKAD Kota Palembang.

Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan untuk memperbaiki dalam menyempurnakan pelaporan keuangan pada BPKAD kota Palembang.

# 3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan di masa yang akan datang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Assidiqi Bahrun. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kelatan Tahun 2008-2012. *Jurnal Profita*. Edisi 5. Hal. 1-11.
- Baldric Siregar. 2015. Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bambang Supriyadi, Dadang Suwanda dan Agung Manghayu. 2017. *Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Cenissa Sajow, Jenny Morasa dan Heince R.N Wokas. 2017. Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. Vol. 5 No. 2.Hal.1214-1224.
- Dwi Ratmono. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ika Maya Sari, Mulyati Akib dan Anggini Shesilia. 2018. Analisis Anggaran Belanja Daerah sebagai Alat Pengendalian pada Badan Pengendalian Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bombana. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 3 No.1.Hal.122-135.
- Indra Christian Lontaan dan Sonny Pangerapan. 2016. Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2012-2014. *Jurnal EMBA*. Vol. 4 No. 1.Hal.898-906.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mirki Vici S. Tenda, Harijanto Sabijono dan Victorina Z. Tirayoh. 2014. Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintahan Kota Manado T.A 2010-2012. *Jurnal EMBA*. Vol.2 No.1. Hal. 638-645.
- Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No.13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Menuju Akrual.
- Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 tahun 2006.

- Ramli Faud. 2015. *Pengantar Akuntansi Keuangan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ramli Faud. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Mirki Vici S. Tenda, Harijanto Sabijono dan Victorina Z. Tirayoh. 2014. Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah. *Jurnal EMBA*. Vol.2 No. 1.Hal.638-645.
- Undang-undang Nomor 9 tahun 2015. Tentang Pemerintahan Daerah.
- V. Wiratna Sujarweni. 2015. Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi. Yogyakarta: PT Pustaka Baru.
- Wempy Banga. 2017. Administrasi Keuangan Negara dan Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif dan Nunung Ayu Sofiati. 2017. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.